



TAJUK RENCANA

Menuju Nol Persen Kawasan Kumuh

LANGKAH Pemkot Yogya untuk melanjutkan pengentasan kawasan kumuh patut diapresiasi, meski target dari pemerintah pusat untuk program ini telah diakhiri. Berdasar data yang ada, luasan kawasan kumuh di Kota Yogya masih tersisa 75,3 hektare yang tersebar di beberapa lokasi, seperti Semaki, Gedongkiwo, Giwangan, Gowongan, Mantrijeron dan lainnya. Meski kawasan kumuh akan didata ulang, mengingat ada hal yang dinilai tidak logis (KR 17/2), namun yang terpenting adalah komitmen untuk mewujudkan Kota Yogya nol persen kawasan kumuh.

Kita memahami kesulitan menata kawasan kumuh, khususnya permukiman di bantaran sungai. Namun, dibanding tahun-tahun sebelumnya, kemajuannya sangat signifikan. Bahkan beberapa titik kawasan kumuh di bantaran sungai berhasil disulap menjadi area publik yang asri dan menjadi tempat rekreasi keluarga, antara lain Bendung Mrican Giwangan, RTH Ngampilan, dan Taman Gajahwong.

Meski begitu, kita perlu memberi catatan untuk perbaikan dan penyempurnaan di kawasan yang telah disulap menjadi tempat rekreasi itu. Beberapa perbaikan seperti penguatan talut untuk permukiman, drainase serta pembuatan IPAL komunal sudah bisa kita lihat hasilnya. Hanya saja, untuk yang disebut terakhir ini, terkadang masih perlu disempurnakan, karena acap masih menimbulkan bau tak sedap. Ini penting diperhatikan karena bangunan IPAL komunal umumnya berdekatan dengan fasilitas publik.

Kita juga memahami bahwa masalah sanitasi dan penanggulangan kebakaran masih menjadi persoalan serius karena padatnya permukiman

dengan gang yang sempit, terutama di bantaran sungai. Kondisi ini tentu membutuhkan penanganan segera, karena bila terjadi kebakaran, akses untuk pemadam kebakaran sangat terbatas.

Selain itu, tak kalah pentingnya adalah *maintenance* atau pemeliharaan agar kawasan yang sudah tertata rapi dan bersih tetap terjaga setiap saat. Idealnya pemeliharaan kawasan tersebut dilakukan secara swadaya, namun alangkah baiknya tetap ada suntikan dana dari pemerintah, baik pusat maupun daerah. Sebab, memelihara kawasan agar tetap bersih, indah dan sehat, tidak lebih gampang ketimbang membangun.

Bila aspek pemeliharaan ini diajarkan, dikhawatirkan justru menimbulkan kekumuhan baru. Sekadar mengingatkan, di beberapa lokasi taman di bantaran sungai, malah dijadikan tempat singgah anak jalanan maupun gelandangan yang kemudian meninggalkan sampah. Untuk itu, karena lokasinya berada di tengah kampung, semestinya pengurus RT maupun RW bertindak lebih tegas terhadap mereka yang *nyampahi* alias membuang sampah sembarangan.

Menanamkan kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan memang butuh proses. Bahkan, sekalipun sudah ada tulisan larangan membuang sampah, tetap saja ada yang melanggar. Selain persoalan tersebut, faktor keamanan juga perlu mendapat perhatian. Kawasan kumuh yang telah disulap menjadi ruang terbuka hijau bisa menjadi pilihan tujuan wisata masyarakat, sehingga pengunjung bukan hanya butuh kenyamanan, tapi juga keamanan. □ - e

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005